

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan yang telah berjalan dalam rentang ruang dan waktu yang panjang memastikan, bahwa gejala tersebut tidak cukup diterangkan sebagai realitas ekonomi. Artinya, ia tidak sekedar gejala keterbatasan lapangan kerja, pendapatan, pendidikan dan kesehatan masyarakat. ia sudah menjadi realitas sistem/struktur dan tata nilai kemasyarakatan. Ia merupakan suatu realitas budaya yang natar lain berbentuk sikap menyerah kepada keadaan.¹ Kemiskinan dapat didefinisikan kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumber daya dalam konteks ini tidak hanya menyangkut aspek finansial, melainkan semua jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas.²

Kemiskinan merupakan fenomena sosial klasik yang sudah merekat dalam masyarakat. ukuran dan pengertiaanya bersifat relatif bergantung pada kondisi sosial ekonomi masyarakat tersebut. Dengan begitu, keyakinan tentang kenyataan bahwa kemiskinan tidak akan bisa dientaskan, melainkan hanya dikurangi jumlah dan diminimalkan derita si miskin, menjadi pandangan yang masuk akal. Demikian halnya dengan yang terjadi pada masyarakat.³

¹ Sri Edi Swasono, dkk, *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan*, (Jakarta: UI Press, 1987), 38.

² Agus Herta Sumarto, *Jurus Mabuk Membangun Ekonomi Rakyat*, (Jakarta: PT. Indeks, 2010), 17.

³ Muhtadi Ridwan, *Geliat Ekonomi Islam*, (Malang : UIN-Maliki Press, 2011),1.

Al- Ghazali mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ketidakmapuan untuk memenuhi apa yang tidak dibutuhkan bukanlah kemiskinan. Jika barang yang dibutuhkan tersedia dan terjangkau oleh seseorang, maka dia tidak akan diperlakukan sebagai orang miskin.⁴

Masalah kemiskinan, nampaknya sudah menjadi gejala umum di seluruh dunia. Karena itulah, pemberantasan kemiskinan dimasukkan dalam agenda pertama dari 8 agenda *Millenium Development Goals* (MDG's) 1990-2015. Bagi Indonesia, upaya penanggulangan kemiskinan dewasa ini menjadi sangat penting karena Bank Dunia telah menyimpulkan bahwa kemiskinan di negara kita bukan sekadar 10-20% penduduk yang hidup dalam kemiskinan absolut (*extreme proverty*).⁵ Kemiskinan absolut adalah kondisi dibawah pendapatan yang menjamin kebutuhan dasar pangan, pakaian, dan perlindungan.⁶ Tetapi ada kenyataan lain yang membuktikan bahwa kurang lebih tiga perlima atau 60% penduduk Indonesia saat ini hidup di bawah garis kemiskinan. Karena itu, mengacu pada paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people-centered, participatory, empowering, ang sustainable*”, maka upaya pemberdayaan masyarakat semakin menjadi kebutuhan dalam setiap upaya pembangunan.⁷

⁴ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 23.

⁵ Totok Mardikanto dan Perwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik*, (Bandung :Alfabeta,2015), 25.

⁶ Sutyastie Soemitro Remi dan Prijono Tjiptoherijanto, *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2002),34.

⁷ Totok Mardikanto dan Perwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik*, ... , 25.

Masalah pemberdayaan masyarakat tidak pernah lepas dari masalah pembangunan dan perubahan sosial. Saat ini kita hidup dalam suatu abad yang dikenal dengan zaman pembangunan (*the age of development*). Zaman dimana suatu gagasan mampu mendominasi dan mempengaruhi pemikiran bangsa-bangsa secara global, menyangkut gagasan pembebasan masalah kemiskinan dan kelatarbelakangan bagi berjuta-juta rakyat di Dunia Ketiga. Istilah “dunia ketiga” sekarang ini memang agak ketinggalan zaman, terutama setelah perang dingin antara Dunia Pertama (blok kapitalis) dan Dunia Kedua (blok sosialis) berakhir. Sebagaimana diketahui, yang dimaksud Dunia Ketiga adalah negara-negara yang tidak masuk kedalam kedua blok tersebut. Tetapi dalam perkembangannya, istilah Dunia Ketiga lebih diartikan sebagai negara-negara yang secara ekonomi masih miskin, atau negara-negara yang sedang berkembang, tanpa melihat ideologinya.⁸

Isu tentang pemberdayaan ekonomi rakyat belakangan ini makin banyak dibicarakan rang pada berbagai kesempatan, baik dalam seminar atau lokakarya maupun dialog radio dan televisi serta media cetak. Maraknya pembicaraan ekonomi rakyat semakin berkembang setelah pengarahan Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr.Ing, B.J. Habibie, pada peringatan hari koperasi ke-51 di Istana Merdeka, tanggal 12 Juli 1998. Pernyataan yang mungkin perlu dijawab adalah kenapa harus ekonomi rakyat.⁹

⁸ Wildana Wargadinata, *Islam dan Pengentasan Kemiskinan*, (Malang : UIN-Maliki Press, 2011), 22.

⁹ Soeharto Prawirokusumo, *Ekonomi Rakyat Konsep, Kebijakan dan Strategi*, (Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 2001), 3.

Pembangunan di suatu wilayah merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindarkan. Setiap wilayah berkeinginan agar di wilayahnya terjadi pembangunan yang dapat dinikmati oleh masyarakat di wilayah tersebut. Artinya, bahwa pembangunan yang perlu dilakukan oleh pemerintah tidak hanya pembangunan fisik saja, melainkan pembangunan yang mengarah kepada pembangunan masyarakat (*community development*). Setiap kegiatan pembangunan masyarakat yang berkaitan dengan proses pemberdayaan masyarakat yang mampu memanfaatkan hasil pembangunan itu sendiri.¹⁰

Menurut teori ilmu jiwa, bahwa manusia memiliki berbagai daya, yakni daya atau kekuatan berfikir, bersikap, dan bertindak. Daya-daya itulah yang harus ditumbuhkembangkan pada manusia dan kelompok manusia agar tingkat berdayanya optimal untuk mengubah diri dan lingkungannya. Pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya adalah sama dengan pembangunan masyarakat. beberapa pendekatan dalam pembangunan masyarakat yang berkembang antara lain:

1. Pendekatan pada masyarakat secara menyeluruh. Pendekatan ini menuntut partisipasi yang luas, masyarakat sebagai konsep sentral, serta memerlukan pendekatan holistik.
2. Pendekatan berdasarkan kemandirian.
3. Pendekatan pemecahan masalah tertentu.
4. Pendekatan demonstratif.
5. Pendekatan eksperimental.

¹⁰ Agus Sjaafari, *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), 1.

6. Pendekatan konflik kekuasaan.¹¹

Pembangunan selama ini telah melahirkan sejumlah “pelayanan kepada masyarakat”; sementara itu pembangunan yang beorientasi pemberdayaan masyarakat akan melahirkan “masyarakat kedalam layanan”. Memberdayakan masyarakat bukan sekedar “memobilisasi masyarakat untuk ambil bagian”; melainkan untuk “mengejar jaringan kemitraan”. Fokus pemberdayaan masyarakat berorientasi pada keluarga. Pemberdayaan ini berisikan: 1.) Membangun kapasitas internal keluarga (pengetahuan, keterampilan, sikap, dan sebagainya); 2.) Mengubah kepercayaan dan perilaku yang menghambat kemajuan (perkawinan usia dini, pelanggaran disiplin, dan kriminalitas); dan 3.) Memperkuat nilai-nilai tradisional yang kondusif untuk pembangunan (gotahal yang dianggang royong, rasa hormat), dan penyaringan nilai-nilai baru.¹²

Proses pemberdayaan yang selama ini dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam meningkatkan keberdayaan keluarga ternyata masih sangat jauh dari harapan keluarga miskin, baik yang ada di kota besar maupun juga yang ada di kota sedang. Kalaupun ada proses pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, namun intensitasnya masih sangat rendah. Hal tersebut ditandai oleh jumlah kegiatan pemberdayaan yang sedikit. Hal yang dianggap paling menyedihkan bagi kalangan keluarga miskin adalah sepertinya tidak ada lembaga yang tergerak untuk melakukan proses pendampingan yang dilakukan kepada kelompok-kelompok usaha tersebut. Jadi, problematika proses

¹¹ Sumaryo Gitosaputro dan Kordiyana K. Ranga, *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015), 27.

¹² Ibid, ...28.

pemberdayaan yang selama diterima oleh kelompok usaha dari kalangan keluarga miskin ini, tidak hanya terbatas pada frekuensi dalam kegiatan pemberdayaan itu sendiri, melainkan juga dari kualitas kegiatan pemberdayaan yang sama diterima oleh kelompok usaha tersebut. Kalaupun terdapat kegiatan pemberdayaan yang pernah dilakukan oleh kelompok usaha dari kalangan keluarga miskin, ternyata tidak mampu menjangkau semua aspek-aspek dalam proses pemberdayaan tersebut antara lain: pengembangan sumber daya ekonomi, pengelolaan usaha, permodalan, membantu jaringan usaha serta pengembangan kelompok. Kegiatan proses pemberdayaan yang pernah dilakukan oleh pihak-pihak luar lebih banyak berkisar pada permodalan saja yaitu bagaimana memberikan pinjaman modal kepada kelompok yang pada kenyataannya bergulir. Aspek-aspek lainnya seperti pendampingan dan pelatihan masih sangat jarang disentuh. Kelompok usaha yang selama ini berjalan lebih banyak ditentukan oleh kemampuan kelompoknya untuk mengelola usaha berdasarkan pengalamannya masing-masing.¹³

Sebagian besar keluarga miskin menganggap bahwa metode pemberdayaan yang selama ini dilakukan lebih banyak menekankan kepada metode sosialisasi dibandingkan dengan menggunakan metode lainnya seperti pelatihan, pendampingan, serta metode lainnya yang tidak termasuk dalam beberapa metode diatas. Metode sosialisasi tersebut, lebih menekankan kepada hal-hal yang bersifat umum dan tidak mendalam dan biasanya tidak ada tindak lanjut untuk menjalankan metode pemberdayaan tersebut. Metode lain yang

¹³ Agus Sjaafari, *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*,.....,91-92.

digunakan porsinya sangatlah kecil. Dengan demikian hasil yang dicapai pun baik yang berkaitan dengan keberhasilan usaha ataupun aspek sosial seperti solidaritas dalam keluarganya masih membutuhkan perbaikan. Lemahnya metode yang lain dikarenakan masih minimnya pengalaman dari pihak-pihak yang terlibat, misalnya dari pihak pemerintah, swasta, konsultan dan sebagainya. Pada akhirnya sangat dibutuhkan metode pemberdayaan lanjutan seperti halnya pelatihan, pendampingan serta metode-metode lainnya.¹⁴

Seiring dengan makin membaiknya tingkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, maka usia harapan hidup masyarakat makin meningkat. Akibatnya jumlah masyarakat tingkat lanjut usia (diatas 60 tahun) maka terjadi ledakan penduduk lanjut usia. Penduduk lansia dunia di tahun 2012 mencapai lebih dari satu milyar. Di Indonesia, penduduk lansia di tahun 1970 baru sekitar 2 juta jiwa tahun 2012 penduduk lansia Indonesia mencapai lebih dari 20 juta jiwa.¹⁵

Adanya lonjakan penduduk lansia ini menuntut perlunya kepedulian kepada lansia. Pemberdayaan lansia dalam sektor pendidikan ditujukan untuk memberikan peran atau aktivitas yang sesuai dengan kondisi fisik dan pengalamannya. Dengan aktivitas yang cukup, lansia akan tetap sehat. Disisi lain, dengan beraktivitas ini, lansia tetap produktif untuk dapat menghasilkan finansial untuk memenuhi keperluan hidupnya. Dengan demikian mereka akan menjadi lansia yang tidak membebani kaum muda dan mandiri. Pendidikan pada lansia juga diarahkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan.

¹⁴ Ibid,.....,92.

¹⁵ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global* (Bandung : Alfabeta,2014), 120.

Pendidikan keagamaan ini sebagai bekal untuk selalu mendekatkan diri kepada yang maha kuasa.¹⁶

Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait pemberdayaan dengan mengambil objek yaitu lansia (lanjut usia) karena sangat jarang ada instansi yang melakukan pemberdayaan terhadap lansia tersebut, peneliti akan melakukan penelitian tentang bagaimana model yang dilakukan untuk pemberdayaan lansia, apa saja metode yang digunakan dan bagaimana dampak pemberdayaan yang dilakukan terhadap kondisi perekonomian lansia. Maka peneliti akan mengangkat penelitian dari masalah pemberdayaan diatas dengan judul “Model Pemberdayaan Ekonomi Lansia (Lanjut Usia) Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) BAZNAS Kota Malang”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana model pemberdayaan ekonomi lansia (lanjut usia) Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) BAZNAS Kota Malang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis model pemberdayaan ekonomi lansia (lanjut usia) Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) BAZNAS Kota Malang.

¹⁶ Ibid,.....,120.

Sedangkan kegunaan penelitian tentang “Model Pemberdayaan Ekonomi Lansia (Lanjut Usia) Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) BAZNAS Kota Malang” adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan penerapan ilmu yang berkaitan dengan aplikasi dan teori-teori yang diperoleh dari bangku kuliah dan mengembangkan pengetahuan tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat

2. Bagi Pembaca

Untuk menambah wawasan bagi para pembaca dan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian berikutnya

3. Bagi Universitas

Untuk menambah kepustakaan dan sebagai tambahan informasi bagi program studi Ekonomi Syariah

4. Bagi Instansi

Untuk menambah informasi dan masukan dalam melakukan peningkatan pemberdayaan ekonomi lansia (lanjut usia)

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis merupakan peneliti pertama yang mengambil penelitian dengan obyek pemberdayaan lansia (lanjut usia) yang terletak di Kelompok Usaha Bersama (KUBE) BAZNAS Kota Malang dan belum pernah ada peneliti yang melakukan penelitian di perusahaan tersebut

karena perusahaan ini tergolong masih baru berdiri. Jadi, penelitian ini merupakan penelitian awal yang di adakan di KUBE dengan mengambil fokus pada model pemberdayaan ekonomi pada lanjut usia yang dilakukan oleh KUBE nan nantinya akan di analisis sesuai dengan pengertian pemberdayaan, tujuan, dan indikator pemberdayaan yang nantinya akan menunjukkan keberhasilan pemberdayaan yang dilakukan oleh Kelompok Usaha Bersama BAZNAS Malang tersebut.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan dan penulisan skripsi yang berjudul “Model Pemberdayaan Ekonomi Lansia (Lanjut Usia) Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) BAZNAS Kota Malang” disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang didalamnya peneliti akan menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, yang didalamnya menguraikan tentang pengertian pemberdayaan, tujuan pemberdayaan, indikator keberdayaan, tahapan pemberdayaan, dan strategi pemberdayaan

BAB III Metode penelitian, yang berisi tentang jenis dan sifat penelitian, lokasi dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpula data, dan metode analisis data

BAB IV Hasil penelitian, yang didalamnya merupakan uraian tentang deskripsi objek penelitian, pembahasan dari analisa data tentang hasil

penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam BAB Pendahuluan. Dimana secara lebih spesifik dalam bab ini menjelaskan tentang model pemberdayaan ekonomi lansia (lanjut usia) Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) BAZNAS Kota Malang.

BAB V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran merupakan sebuah pernyataan singkat yang diambil peneliti dari hasil analisis dan pembahasan penelitian. Tak hanya itu, peneliti juga akan mencoba memberikan saran yang dapat membangun dan dapat dimanfaatkan oleh pihak pembaca dan peneliti selanjutnya.